



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 15 SEPTEMBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Ketua H. Abdullah Nashir, Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Kayan, SH, Wakil Ketua Warih Andono, SE

Pemkab Desak BGN Tutup Sementara 21 Dapur Tak Berizin

Karena Sulit Awasi SPPG

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi izin. Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut dari peristiwa keracunan massal di Ponpes Manba'ul Hikmah, Tanggulangin.



SPPG DI KOTA DELTA
Jumlah 170 SPPG
Belum mengantongi SLHS 43 SPPG
Belum berizin 21 SPPG
Sumber: Pemkab Sidoarjo

43 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami sudah merekomendasikan kepada BGN agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan tidak diberikan izin operasional," kata Ainur. Menurut dia, dapur yang izinnya tak lengkap, termasuk SLHS, seharusnya tidak boleh menjalankan kegiatan operasional. Itu sesuai dengan aturan MBG.



Kami sudah merekomendasikan kepada BGN agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan tidak diberikan izin operasional.

Muhammad Ainur Rahman
Ketua Satgas MBG Sidoarjo

Tetap Dukung Program
Ainur yang juga menjabat Pih Sekda Sidoarjo itu menegaskan, Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau memberikan izin operasional SPPG. Ke-

wenangan tersebut berada di tangan BGN. Pemkab hanya menjalankan fungsi koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, pihaknya berharap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti BGN. Penghentian sementara merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dapur MBG, terlebih setelah muncul persoalan yang berdampak kepada penerima manfaat.

Meski meminta 21 SPPG yang belum berizin tidak beroperasi, Ainur memastikan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung pelaksanaan program MBG. "Kami tetap mendukung. Namun, dukungan harus dibarengi dengan pemenuhan standar keamanan dan kelayakan pengolahan makanan," katanya.

Kemampuan Dinkes Terbatas

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuvantina mengatakan, pengawasan terhadap SPPG memiliki keterbatasan. Dinkes memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi, tetapi tidak memegang kendali penuh atas operasional dapur SPPG.

"Kita punya kewenangan, tapi kemampuan kita juga terbatas," ujarnya. Lakhsmie menambahkan, petugas tidak mungkin melakukan pengawasan selama 24 jam terhadap seluruh SPPG. Karena itu, pengelola dapur memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai standar. (ful/hen)

BIROKRASI

Jadi, bukan hanya ganti nama. Tugas dan pembagian jam kerjanya juga disesuaikan."

Supriyono
Ketua Pansus III DPRD Sidoarjo

BKD Berubah Jadi BKPSDM, BPPD Ganti Bapenda

SIDOARJO – Nama dan fungsi tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo bakal mengalami perubahan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan berganti nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sedangkan, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ketua Pansus III DPRD Sidoarjo Supriyono mengatakan, perubahan nomenklatur tersebut tidak sebatas pergantian nama. Penyesuaian juga menyangkut tugas dan fungsi organisasi agar sesuai ketentuan berlaku. "Jadi, bukan hanya ganti nama. Tugas dan pembagian jam kerjanya juga disesuaikan," katanya kemarin (14/9).

Selain BKD dan BPPD, perubahan nomenklatur juga terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang akan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). (ful/hen)

Target Buka 2027, RSUD Sedati Butuh 300 Pegawai

SIDOARJO – RSUD Sedati Sidoarjo ditargetkan mulai melayani masyarakat pada 2027. Seiring pembangunan gedung yang kembali berjalan sejak Juni, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) mulai dipetakan. Rumah sakit tipe D tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 300 pegawai untuk menunjang pelayanan.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Sidoarjo Etik mengatakan, kebutuhan SDM RSUD Sedati akan disiapkan secara bertahap sesuai dengan jenis pelayanan yang nantinya dibuka. Sebelum perekrutan tenaga baru, kebutuhan pegawai untuk tahap awal akan dipenuhi dengan menarik tenaga dari puskesmas maupun rumah sakit lainnya. Skema tersebut disiapkan untuk memastikan pelayanan dapat berjalan ketika RSUD Sedati mulai beroperasi.

Etik menyebut kebutuhan tenaga akan dipetakan ber-



MASIH PEMBANGUNAN: RSUD Sedati yang dianggarkan Rp 45 miliar telah mencapai 20 persen kemarin.

dasarkan layanan yang disiapkan. Dengan begitu, jumlah dan kompetensi SDM dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian. "Insyaallah kami ajukan juga nakes baru," kata Etik.

Hitung Kebutuhan SDM sejak Awal

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarsa mengatakan, persiapan SDM tidak boleh menunggu pembangunan gedung rampung. Kebutuhan nakes maupun

tenaga pendukung harus dihitung sejak awal agar rumah sakit siap beroperasi sesuai target. "Saya rasa jangan menunggu gedung selesai baru menyiapkan SDM. Kebutuhannya harus dihitung dan dipersiapkan dari sekarang," katanya.

Menurut Bangun, kebutuhan tenaga tidak hanya berkaitan dengan jumlah. Kompetensi serta kebutuhan masing-masing bagian juga perlu dipetakan. Hal tersebut penting agar ketika rumah sakit mulai dibuka, pelay-

anan tidak terganggu akibat kekurangan tenaga. Selain SDM, persiapan alat kesehatan dan fasilitas pendukung juga diminta berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Dengan begitu, tidak ada tahapan besar yang masih harus dikerjakan setelah gedung selesai dan berpotensi menunda pelayanan. "Untuk rumah sakit tipe D, layanan dasarnya biasanya layanan penyakit dalam, anak, bedah, dan kandungan. Ini harus disiapkan," ujarnya. (ful/hen)

PUTRA MAHKOTA RESMI DIKUKUHKAN, PENGURUS KONI PERIODE 2025-2029 SIAP BERKOLABORASI DEMI SIDOARJO JUARA



Sidoarjo, Pojok Kiri. – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 resmi dikukuhkan di Pendopo Delta Wibawa pada Minggu (13/9/2026). Disaksikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua Umum KONI Sidoarjo terpilih H. Rafi Wibisono yang merupakan putra Mahkota Sidoarjo resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil.

Sebagai Dewan Pelindung, Bupati Subandi meminta pengurus KONI Sidoarjo yang baru dilantik agar senantiasa menjaga amanah serta tidak mengesampingkan para atlet kebanggaan Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra pembibitan atlet berbakat. Tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan proses seleksi atlet yang terus berjalan. "Sidoarjo memiliki banyak

atlet berbakat sehingga generasi muda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut menjadi aset daerah yang unggul demi mengharumkan nama Sidoarjo," ujarnya.

Subandi menambahkan, pemerintah akan terus memberikan dukungan sistem bagi KONI Sidoarjo. Namun, dukungan itu perlu diimbangi dengan komitmen generasi muda yang tangguh, cerdas, dan pekerja keras guna membawa perubahan positif bagi KONI Sidoarjo. Lebih-lebih saat ini merupakan masa persiapan Porprov. Perlu dipersiapkan langkah strategis dalam mempersiapkan para atlet untuk dapat meraih dan mempertahankan gelar juara.

Pemkab Sidoarjo Usul: Camat, Kepala Puskesmas dan Kades Diberi Kewenangan Awasi SPPG

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo tak ingin sekadar menjadi penonton dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah yang bermitra dengan Surabaya itu mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.

Usulan tersebut dinilai penting karena dampak pelaksanaan MBG langsung dirasakan masyarakat Sidoarjo. Terlebih, kasus keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikmah, Desa Pura, Kecamatan Tanggulangin, menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola program tersebut.

Pelaksana Tugas (Pik) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki perangkat Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah yang bermitra dengan Surabaya itu mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.

Usulan tersebut dinilai penting karena dampak pelaksanaan MBG langsung dirasakan masyarakat Sidoarjo. Terlebih, kasus keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikmah, Desa Pura, Kecamatan Tanggulangin, menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola program tersebut. Pelaksana Tugas (Pik) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki perangkat Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah yang bermitra dengan Surabaya itu mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.



HEBOH: Kemunculan buaya di tepi sungai tak jauh dari kawasan pergudangan CIP, Desa Kemiri, Sidoarjo.

Buaya Besar Muncul di Tepi Sungai Dekat Pergudangan

BUDURAN-Kemunculan buaya berukuran besar kembali membuat heboh di perairan Sidoarjo. Kali ini, seekor buaya terlihat di tepi sungai belakang kawasan pergudangan Central Industri Park (CIP), Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Senin (14/9) pagi.

Buaya tersebut diketahui oleh Hidayat Syafullah saat mengantar rombongan guru yang hendak berangkat mengajar ke Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran. Saat itu, rombongan melintas menggunakan perahu seki-

tar pukul 07.00 WIB.

Hidayat mengatakan, buaya berukuran cukup besar itu terlihat berada di tepian sungai. Dari kejauhan, satwa tersebut tampak seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi. "Buayanya muncul di pinggir sungai. Awalnya terlihat seperti sedang berjemur," kata Hidayat.

Setelah beberapa saat berada di tepian, buaya tersebut kemudian bergerak menyusuri pinggir sungai. Keberadaan reptil tersebut sontak menjadi perhatian rombongan

● Ke Halaman 10

Buaya Besar Muncul...

guru yang berada di dalam perahu. Satwa yang sama juga sempat terlihat pada Senin (7/9) tepat di lokasi yang sama. Setelah mendengar suara dari rombongan yang melintas, satwa tersebut perlahan masuk kembali ke dalam sungai. "Karena perahu agak ramai dan terdengar suara, buayanya kemudian masuk ke sungai," ujarnya.

Menurut Hidayat, kemunculan

buaya di lokasi tersebut bukan kali pertama. Satwa yang sama juga sempat terlihat pada Senin (7/9) tepat di lokasi yang sama. Setelah mendengar suara dari rombongan yang melintas, satwa tersebut perlahan masuk kembali ke dalam sungai. "Karena perahu agak ramai dan terdengar suara, buayanya kemudian masuk ke sungai," ujarnya.

Hidayat mengaku beberapa kali melihat kemunculan buaya ketika mengantar rombongan guru menuju Dusun Kepetingan. Para guru tersebut mengajar di sekolah yang berada di wilayah Desa Sawohan.

"Minggu sebelumnya juga muncul di

tempat yang sama. Biasanya memang terlihat saat saya mengantar guru ke Kepetingan," ungkapnya.

tersebut juga disaksikan sejumlah guru yang berada di dalam perahu. Mereka sempat terkejut lantaran melihat satwa liar berukuran besar berada cukup dekat dengan jalur perahu.

Salah seorang guru, Laily (24) mengaku baru pertama kali melihat buaya secara langsung dari jarak

yang relatif dekat. Ia sempat kaget saat mengetahui ada buaya berada di tepian sungai.

"Saya baru pertama kali melihat buaya secara langsung dan jaraknya cukup dekat. Sempat kaget, tapi karena bersama rombongan jadi tidak terlalu takut," kata Laily.

Meski demikian, kemunculan buaya tersebut tidak sampai mengganggu perjalanan rombongan guru menuju sekolah. Mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk mengajar di SMP Satu Atap di Dusun Kepetingan. "Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan rombongan," tutup Laily. (sur/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Usul Punya Kewenangan Awasi SPPG

KOTA-Pemkab Sidoarjo ingin tak sekadar menjadi penonton dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Sidoarjo.

Usulan tersebut dinilai penting karena dampak pelaksanaan MBG langsung dirasakan masyarakat Sidoarjo. Terlebih, kasus keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoar-



USULAN: SPPG Kalitengah saat ini masih ditutup sementara.

jo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki perangkat hingga tingkat wilayah yang dinilai dapat dilibatkan dalam pengawasan SPPG. "Pak Bupati menyarankan, kita juga diberi kewenangan untuk mengawasi," ujar Ainur, Senin (14/9).

Menurut Ainur, Pemkab memiliki jaringan pengawasan yang cukup lengkap. Mulai dari kepala puskesmas (kapus), camat, hingga kepala desa (kades). Keterlibatan perangkat daerah tersebut dinilai dapat membuat pengawasan terhadap SPPG lebih efektif karena berada langsung di wilayah penerima manfaat. "Ini kan lebih mudah. Kita punya kepala puskesmas, kita punya camat,

● Ke Halaman 10



Pemkab Usul...

kepala desa. Itu kan akan lebih efektif," jelasnya.

Usulan tersebut, lanjut Ainur, telah disampaikan kepada pihak BGN, termasuk saat jajaran BGN dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) hadir di Sidoarjo. Penyampaian juga dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat. "Rekomendasi dari provinsi, korwil provinsi hadir kemarin. Sudah disam-

paikan itu. Kita menyampaikan seper-ti itu," katanya.

Pemkab Sidoarjo menilai pembagian kewenangan pengawasan menjadi penting. Sebab, ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah pusat sebagai penyelenggara program, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Pemkab tetap mendukung program tersebut, namun meminta adanya pembenahan tata kelola agar pelaks-

anaannya lebih aman dan terkontrol. "Kita mendukung program ini, tapi ada perbaikan dalam tata kelola, pasti," ungkap Ainur.

Salah satu poin yang didorong Pemkab adalah persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG yang belum mengantongi SLHS dinilai seharusnya tidak diperbolehkan menjalankan operasional sebelum memenuhi persyaratan tersebut.

"Salah satunya yang kita usulkan tadi, kalau SPPG-nya itu belum ber-

SLHS, alangkah baiknya jangan diberi izin operasional," tandasnya.

Dorongan pengawasan tersebut semakin relevan setelah kasus keracunan massal MBG terjadi di Ponpes Manbaul Hikam, Tanggulangin. Ratusan santri menjadi korban setelah menyantap makanan MBG yang dipasok SPPG Kalitengah. SPPG tersebut kemudian disuspend.

Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai. Sebanyak 116 santri sempat kembali dibawa ke rumah

sakit karena diduga mengalami kembuhan gejala. Sebagian besar telah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.

Dengan cakupan MBG yang menyasar ribuan penerima manfaat setiap hari, Pemkab Sidoarjo menilai pengawasan tidak bisa hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Pengawasan harus diperkuat sejak makanan diproduksi, sebelum didistribusikan, hingga diterima dan dikonsumsi masyarakat. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RSUD Sedati Ditarget Beroperasi 2027

SEDATI-Warga Sedati dan kawasan sekitarnya tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo me-

nargetkan RSUD Sedati mulai beroperasi pada 2027.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan kehadiran RSUD Sedati diharapkan mampu memperluas akses layanan keseha-

tan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo akan memprioritaskan warga asli Sedati untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di rumah sakit tersebut. Mulai dari perawat, bidan, hingga dokter.

"Juga nanti pada tahun 2027, kita sudah punya rumah sakit baru.

Karena Rumah Sakit

Sedati ini untuk melayani rumah sakit yang ada di sekitar Sedati, Gedangan dan Buduran," ujar Subandi, Senin (14/9).

Subandi menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar lokasi.

"Kita ingin fasilitas kesehatan (faskes) yang dibangun di sini juga membawa dampak penyerapan tenaga kerja

● Ke Halaman 10

FASILITAS KESEHATAN: Pembangunan RSUD Sedati terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian bangunan.

FENOMENA



RSUD Sedati...

bagi masyarakat lokal," tegasnya.

Keberadaan RSUD Sedati juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menuju rumah sakit di wilayah lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Terlebih, masyarakat kurang mampu nantinya diharapkan dapat memperoleh pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

"Karena saya kepingin dengan wilayah padat penduduk seperti ini, masyarakat tidak lari jauh-jauh, apalagi warga kita yang tidak mampu bisa kita akomodir di rumah sakit daerah,"

jelas Subandi.

Sebagai informasi, pembangunan RSUD Sedati menelan anggaran sekitar Rp 42,64 miliar.

Rumah sakit tersebut menjadi salah satu proyek strategis Pemkab Sidoarjo untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.

RSUD Sedati merupakan rumah

sakit tipe D yang disiapkan untuk melayani masyarakat di kawasan Sedati dan wilayah sekitarnya, termasuk Waru, Gedangan hingga Sukodono.

Rumah sakit tersebut berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dengan konsep lima blok bangunan. Gedung utama dirancang tiga lantai

dan memiliki kapasitas hingga 50 tempat tidur.

Dengan target operasional pada 2027, Pemkab Sidoarjo berharap RSUD Sedati tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan baru, tetapi juga menjadi penggerak pelayanan publik dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Usulkan Camat, Kepala Puskesmas dan Kades Awasi SPPG

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo tak ingin sekadar menjadi penonton dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah yang bertetangga dengan Surabaya itu mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.

Usulan tersebut dinilai penting karena dampak pelaksanaan MBG langsung dirasakan masyarakat Sidoarjo. Terlebih, kasus keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki perangkat hingga tingkat wilayah yang dinilai dapat dilibatkan dalam pengawasan

SPPG. "Pak Bupati menyarankan, kita juga diberi kewenangan untuk mengawasi," ujar Ainur, Senin (14/9).

Menurut Ainur, Pemkab memiliki jaringan pengawasan yang cukup lengkap. Mulai dari kepala puskesmas (kapus), camat, hingga kepala desa (kades). Keterlibatan perangkat daerah tersebut dinilai dapat membuat pengawasan terhadap SPPG lebih efektif karena berada langsung di wilayah penerima manfaat.

"Ini kan lebih mudah. Kita punya kepala puskesmas, kita punya camat, kepala desa. Itu kan akan



Pemkab Sidoarjo, camat, kepala Puskesmas dan kepala desa menggelar rapat bersama BGN.

lebih efektif," jelasnya.

Usulan tersebut, lanjut Ainur, telah disampaikan kepada pihak BGN, termasuk saat jajarannya BGN dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) hadir di Sidoarjo. Penyampaian juga dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah provinsi hingga ke

pemerintah pusat.

"Rekomendasi dari provinsi, korwil provinsi hadir kemarin. Sudah disampaikan itu. Kita menyampaikan seperti itu," katanya.

Pemkab menilai pembagian kewenangan pengawasan menjadi penting. Sebab, ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan

MBG, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah pusat sebagai penyelenggara program, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Pemkab tetap mendukung program tersebut, namun meminta adanya pembenahan tata kelola agar pelaksanaannya lebih aman dan terkontrol.

"Kita mendukung program ini, tapi ada perbaikan dalam tata kelola," ungkap Ainur.

Salah satu poin yang didorong Pemkab adalah persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG yang belum mengantongi SLHS dinilai seharusnya tidak diperbolehkan menjalankan operasional sebelum memenuhi persyaratan tersebut.

"Salah satunya yang kita usulkan tadi, kalau SPPG-nya itu belum ber-SLHS, alangkah baiknya jangan diberi izin operasional," tandasnya. (sud/jok/fdn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Pemkab Sidoarjo mengusulkan camat, kepala Puskesmas dan kepala desa diberi kewenangan mengawasi SPPG.

Pemkab Sidoarjo Usul: Camat, Kepala Puskesmas dan Kades. Diberi Kewenangan Awasi SPPG

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo tak ingin sekadar menjadi penonton dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah yang bertetangga dengan Surabaya itu mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.

Usulan tersebut dinilai penting karena dampak pelaksanaan MBG langsung dirasakan masyarakat Sidoarjo. Terlebih, kasus keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sek-

retaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki perangkat hingga tingkat wilayah yang dinilai dapat dilibatkan dalam pengawasan SPPG. "Pak Bupati menyarankan, kita juga diberi kewenangan untuk mengawasi," ujar Ainur, Senin 14 September 2026.

Menurut Ainur, Pemkab memiliki jaringan pengawasan yang cukup lengkap. Mulai dari kepala puskesmas (kapus), camat, hingga kepala desa (kades). Keterlibatan perangkat daerah tersebut dinilai dapat membuat pengawasan terhadap SPPG lebih efektif karena berada langsung di wilayah penerima manfaat. "Ini kan lebih mudah. Kita punya kepala puskesmas, kita punya camat, kepala desa. Itu kan

akan lebih efektif," jelasnya.

Usulan tersebut, lanjut Ainur, telah disampaikan kepada pihak BGN, termasuk saat jajaran BGN dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) hadir di Sidoarjo. Penyampaian juga dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat. "Rekomendasi dari provinsi, korwil provinsi hadir kemarin. Sudah disampaikan itu. Kita menyampaikan seperti itu," katanya.

Pemkab Sidoarjo menilai pembagian kewenangan pengawasan menjadi penting. Sebab, ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah pusat sebagai penyelenggara program, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat. (rus)

PUTRA MAHKOTA RESMI DIKUKUHKAN, PENGURUS KONI PERIODE 2025-2029 SIAP BERKOLABORASI DEMI SIDOARJO JUARA



Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 menjalani prosesi pengukuhan di Pendopo Delta Wibawa pada Minggu (13/9/2026). Disaksikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua Umum KONI Sidoarjo terpilih M. Rafi Wibisono yang merupakan putra Mahkota Sidoarjo resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil.

Sebagai Dewan Pelindung, Bupati Subandi meminta pengurus KONI Sidoarjo yang baru dilantik agar senantiasa menjaga amanah serta tidak mengecewakan para atlet kebanggaan Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra pengembangan atlet berbakat. Tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan proses seleksi atlet yang terus berjalan.

"Sidoarjo memiliki banyak

atlet berbakat sehingga generasi muda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut menjadi aset daerah yang unggul demi mengharumkan nama Sidoarjo," ujarnya.

Subandi menambahkan, pemerintah akan terus memberikan dukungan sistem bagi KONI Sidoarjo. Namun, dukungan itu perlu diimbangi dengan komitmen generasi muda yang tangguh, cerdas, dan pekerja keras guna membawa perubahan positif bagi KONI Sidoarjo. Lebih-lebih saat ini merupakan masa persiapan Porprov. Perlu dipersiapkan langkah strategis dalam mempersiapkan para atlet untuk dapat meraih dan mempertahankan gelar juara.

"Keberhasilan akan tercapai melalui kolaborasi strategis. Pemberian dukungan yang saling berkelanjutan serta sinergi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan pengurus KONI,"

tegas Subandi.

Ketua Umum KONI Sidoarjo (2025-2029) Muhammad Rafi Wibisono menyampaikan, proses untuk bisa menjadi Ketua Umum KONI Sidoarjo bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui hingga bisa sampai pada tahap terpilih sebagai Ketua Umum KONI Sidoarjo periode 2025-2029.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Kabupaten Sidoarjo yang telah melaksanakan serangkaian proses penjaringan dan pendalaman sehingga agenda pelantikan ini dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Rafi Wibisono menyampaikan apresiasi atas peluang yang diberikan kepada generasi muda untuk berkontribusi dan memegang peran kepemimpinan. Generasi muda bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan investasi masa depan yang perlu dibimbing serta diberi ruang untuk berkembang.

KONI Sidoarjo berkomitmen untuk merealisasikan rencana kerja strategis melalui program "Atlet Unggul dan Sidoarjo Juara". Itu merupakan visi strategis KONI Sidoarjo untuk empat tahun ke depan. Konsep Atlet Unggul mengintegrasikan pembinaan berjenjang dengan peningkatan kesejahteraan atlet. Sebagai upaya berkelanjutan dalam mencapai prestasi, KONI Sidoarjo berkomitmen mengoptimalkan pembinaan sejak usia dini hingga muda. Serta, menjamin pemenuhan kesejahteraan bagi para atlet berprestasi.

"Program pembinaan berjenjang ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan menuju Porprov 2027. Bagi para atlet berprestasi, kami berkomitmen untuk mengupayakan pemberian bonus, beasiswa pendidikan, serta jaminan pengembangan karier dan kesejahteraan masa depan mereka," ungkap Rafi Wibisono. (Khol/Dy)

Target Buka 2027, RSUD Sedati Butuh 300 Pegawai

SIDOARJO – RSUD Sedati Sidoarjo ditargetkan mulai melayani masyarakat pada 2027. Seiring pembangunan gedung yang kembali berjalan sejak Juni, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) mulai dipetakan. Rumah sakit tipe D tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 300 pegawai untuk menunjang pelayanan.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Sidoarjo Etik mengatakan, kebutuhan SDM RSUD Sedati akan disiapkan secara bertahap sesuai dengan jenis pelayanan yang nantinya dibuka. Sebelum perekrutan tenaga baru, kebutuhan pegawai untuk tahap awal akan dipenuhi dengan menarik tenaga dari puskesmas maupun rumah sakit lainnya. Skema tersebut disiapkan untuk memastikan pelayanan dapat berjalan ketika RSUD Sedati mulai beroperasi.

Etik menyebut kebutuhan tenaga akan dipetakan ber-



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MASIH PEMBANGUNAN:
Progres RSUD Sedati yang dianggarkan Rp 45 miliar telah mencapai 20 persen kemarin.

dasarkan layanan yang disiapkan. Dengan begitu, jumlah dan kompetensi SDM dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian. "Insyaallah kami ajukan juga nakes baru," kata Etik.

Hitung Kebutuhan SDM sejak Awal

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, persiapan SDM tidak boleh menunggu pembangunan gedung rampung. Kebutuhan nakes maupun

tenaga pendukung harus dihitung sejak awal agar rumah sakit siap beroperasi sesuai target. "Saya rasa jangan menunggu gedung selesai baru menyiapkan SDM. Kebutuhannya harus dihitung dan dipersiapkan dari sekarang," katanya.

Menurut Bangun, kebutuhan tenaga tidak hanya berkaitan dengan jumlah. Kompetensi serta kebutuhan masing-masing bagian juga perlu dipetakan. Hal tersebut penting agar ketika rumah sakit mulai dibuka, pela-

yanan tidak terganggu akibat kekurangan tenaga.

Selain SDM, persiapan alat kesehatan dan fasilitas pendukung juga diminta berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Dengan begitu, tidak ada tahapan besar yang masih harus dikerjakan setelah gedung selesai dan berpotensi menunda pelayanan. "Untuk rumah sakit tipe D, layanan dasarnya biasanya layanan penyakit dalam, anak, bedah, dan kandungan. Ini harus disiapkan," ujarnya. (ful/hen)

Jawa Pos



BERJEMUR: Buaya berukuran besar terekam saat berada di tepi Sungai Sidokare kemarin (14/9). HIDAYAT SYAIFULLAH

Buaya Sungai Sidokare "Sapa" Rombongan Guru

SIDOARJO – Rombongan guru SMP Satu Atap punya cerita berkesan saat berangkat ke sekolah kemarin (14/9). Seekor buaya kembali muncul di tepi Sungai Sidokare, tepatnya di belakang area pergudangan CIP, Desa Kemiri, seolah-olah menyapa rombongan guru yang saat itu menaiki perahu.

Tak ingin melewatkan momen, sejumlah guru langsung mengarahkan kamera ponsel ke reptil tersebut. Buaya tampak berada di lumpur tepian sungai yang airnya sedang surut. Pengemudi perahu, Hidayat Syaifullah mengatakan, buaya muncul sekitar pukul 07.00.

Namun, keberadaan rombongan perahu tampaknya membuat reptil tersebut tidak betah berlama-lama. "Mungkin buayanya

takut. Saat kami lewat, dia langsung masuk sungai," kata Hidayat. Menurut dia, kemunculan buaya di lokasi tersebut bukan kejadian baru. Tepian sungai di belakang pergudangan CIP disebut kerap menjadi tempat buaya naik untuk berjemur.

Kemunculan buaya kali ini menjadi pengalaman baru bagi Laily, salah seorang guru yang ikut dalam rombongan. Dia mengaku baru pertama kali melihat buaya secara langsung dari atas perahu saat perjalanan menuju sekolah.

Meski sempat terkejut, Laily tidak sampai panik. Keberadaan rombongan membuatnya merasa lebih tenang saat melihat buaya tersebut. "Sempat kaget, tapi karena bersama rombongan jadi tidak terlalu takut," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos

Penutup Drainase Ambrol, Pengendara Terperosok



SUDAH TIGA MINGGU: Warga memberi tanda penutup drainase yang ambrol agar pengendara lebih hati-hati.

SIDOARJO – Beton penutup drainase di bahu Jalan Raya Tropodo, Waru, ambrol. Kerusakan tersebut membuat lubang menganga di sisi jalan dan sempat mengganggu pengguna jalan. Satu pemotor terperosok, sedangkan sebuah mobil sempat tersangkut bannya.

Kondisi beton yang ambrol itu diketahui sudah berlangsung sekitar tiga pekan. Lokasinya berada tak jauh dari jalan keluar Jalan Tropodo Jaya menuju arah Surabaya. Kerusakan membuat lubang selebar hampir satu meter.

Salah satu warga, Ghoni mengatakan, kondisi tersebut cukup membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan yang hendak keluar dari Jalan Tropodo Jaya. "Ada mobil dari Jalan Tropodo Jaya, mau ke kiri arah Surabaya bannya terperosok," ujarnya kemarin (14/9).

Tak hanya mobil, sejumlah pengendara motor juga sempat mengalami kejadian serupa. Ada seorang pengendara motor yang terluka karena terperosok. Agar tidak membuat celaka, warga kemudian memasang penanda di sekitar lubang.

Ghoni mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab ambrolnya beton penutup drainase tersebut. Namun, dia menduga kondisi itu tidak terlepas dari tingginya aktivitas kendaraan yang melintas.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Makhmud mengatakan, pihaknya akan mengecek kondisi beton penutup drainase. Menurut dia, beton yang ambrol merupakan bagian dari pembangunan drainase yang dilakukan sekitar tiga tahun lalu. "Kami cek dan coba perbaiki agar normal lagi," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos

BIROKRASI



“Jadi, bukan hanya ganti nama. Tugas dan pembagian jam kerjanya juga disesuaikan.”

Supriyono

Ketua Pansus III DPRD Sidoarjo

BKD Berubah Jadi BKPSDM, BPPD Ganti Bapenda

SIDOARJO – Nama dan fungsi tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo bakal mengalami perubahan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan berganti nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sedangkan, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ketua Pansus III DPRD Sidoarjo Supriyono mengatakan, perubahan nomenklatur tersebut tidak sebatas pergantian nama. Penyesuaian juga menyangkut tugas dan fungsi organisasi agar sesuai ketentuan berlaku. “Jadi, bukan hanya ganti nama. Tugas dan pembagian jam kerjanya juga disesuaikan,” katanya kemarin (14/9).

Selain BKD dan BPPD, perubahan nomenklatur juga terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang akan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). (ful/hen)

Jawa Pos



Kondisi Sosial Warga Butuh Perhatian Pemerintah

 by **cakrajatim** — 15 September 2026 in Uncategorized  0



Komisi D DPRD Sidoarjo gelar hearing dengan pengurus PKDI Sidoarjo membahas masalah DTSEN terkait klasifikasi desil.

09

SHARESVIEWS

  Share on Twitter

 Share on FB



Sidoarjo – CakraJatim.com: Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan pengurus PKDI Sidoarjo, Senin (13/9/2026) siang tadi, dengan puluhan Kades yang mewakili setiap kecamatan di wilayah Sidoarjo, dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait

 **CakraJatim.com**

BERITA POPULER



Sidoarjo Kembali Diguncang
OTT

 0 SHARES

01

02 Razia Kendaraan di Lebo, di Demo
Sejumlah Massa

 0 SHARES

03 Anam dan Atok Lolos DCT, Umi Kaddah
Terjungkal

 0 SHARES

04 Paripurna DPRD Sidoarjo Hanya Dihadiri
16 Anggota

 0 SHARES

05 Pertikaian Bashor dan Bambang Berujung
ke BK

 0 SHARES



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Data Desil DTSEN Tak Sinkron, Bangun DPRD Sidoarjo Minta Bupati Terbitkan Surat Edaran

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat
Senin, 14 September 2026 21:54 WIB

Admin - Author Dapatkan Kalender Digital
Senin, 14 September 2026 - 21:54 WIB



Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun. (Dok. Syaiful/DigitalJatim)

AAA

Berita Terkait

Target LP2B Nasional
Terlampai, Wagub Emil
Dorong Percepatan

Sidoarjo – Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyoroti persoalan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketidaksesuaian data tersebut dinilai berdampak pada akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Sidoarjo Bersama PKDI Gelar Hearing Terkait Pembahasan DTSEN



@Lensa Global
Senin, 14 September 2026, September 14, 2026
WIB



Komentar ()



Acara Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo bersama PKDI kabupaten Sidoarjo.(ft:red)

SIDOARJO|LENSA-GLOBAL.com – Komisi D DPRD Sidoarjo gelar hearing bersama Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kab. Sidoarjo terkait carut marutnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di kabupaten Sidoarjo. Senin (25/9/2026) di ruang rapat DPRD Sidoarjo





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hearing, Komisi D DPRD Sidoarjo Bersama PKDI 'Bedah' Desil, Inilah Hasilnya

Pemutakhiran desil berkaitan dengan DTSEN perlu melibatkan kepala desa maupun pejabat RT/RW agar mendapatkan data akurat terkait tingkat perekonomian masyarakat.

🕒 Sep 14, 2026 - 18:03



Komisi D DPRD Sidoarjo gelar hearing dengan pengurus PKDI Sidoarjo membahas masalah DTSEN terkait klasifikasi desil.

NUSADAILY – SIDOARJO: Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kab. Sidoarjo 'wadhul' ke DPRD Sidoarjo terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Terutama menyangkut desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dari angka 1 sampai 10 sebagai penentu penerima bantuan sosial.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bahas DTSEN Desil, Komisi D DPRD Sidoarjo Lakukan Hearing atas Pendataan dan Bansos Yang Dikeluhkan Kades



M Hasan, Panjinasional - Selasa, 15 September 2026 | 07:27 WIB

Dukung Jurnalisme



Situasi Ruang Komisi D lantai 2 saat pelaksanaan hearing terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Menggelar Rapat Dengar Pendapat Terkait DTSEN

2 menit membaca

View : 3

admin

EKONOMI BISNIS - 15 Sep 2026

